

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diberikan beberapa penjelasan teori-teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini dan beberapa studi empiris yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Pada bagian ini juga akan dibahas mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang juga berkaitan dengan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah.

2.1. Landasan Teori

Pada sub bab ini akan diberikan beberapa teori – teori yang mendukung untuk melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teori yang akan dipakai adalah teori yang berhubungan dengan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah.

2.1.1. Desentralisasi Fiskal

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian yang terintegrasi dalam menciptakan arah pembangunan nasional yang semakin baik. Pembangunan daerah di sini juga dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah sehingga menciptakan kapabilitas yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Pembangunan daerah dapat dijelaskan melalui dua pendekatan (Saragih, 2003:11), yaitu melalui pendekatan sentralistis dimana pelaksanaan pembangunan yang merupakan kewenangan pusat dan pelaksanaannya oleh pelaku birokrasi di pusat secara sepenuhnya. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan desentralistis, dimana dalam pelaksanaan pembangunannya merupakan wewenang pemerintah daerah dan pelaksanaannya juga dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah yang berwenang.

Pelaksanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan desentralisasi memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana memenuhi prinsip efektif, efisien, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tujuan selanjutnya adalah sebagai salah satu sarana dalam memberdayakan masyarakat lokal sehingga dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, aman, nyaman dan sejahtera. Oleh karena itu proses desentralisasi (otonomi) dianggap sebagai jalan yang lebih tepat dalam melaksanakan pembangunan daerah yang lebih terarah. Hal mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan dibahas secara lebih mendalam di dalam subbab selanjutnya.

2.1.1.1. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan

Menurut PP Nomor 105 Tahun 2000 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian,

dijelaskan juga pada UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 78 Ayat (1) bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD. Selanjutnya, pada Pasal 78 Ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dana APBD digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah, terutama untuk pelaksanaan otonomi. Dana APBN akan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di daerah dalam rangka desentralisasi dalam bentuk tugas perbantuan dan dekonsentrasi.

Keuangan daerah merupakan wewenang dari masing-masing pemerintah daerah dimana di dalam keuangan daerah juga terdapat komponen pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah telah diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 3,4,5, dan 79 serta telah diatur juga di dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 6 yang mengatakan bahwa terdapat beberapa sumber pendapatan daerah, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dari keempat sumber PAD yang memiliki kontribusi cukup besar di dalamnya adalah pemasukkan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Dana Perimbangan yang terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman Daerah
 4. Pendapatan daerah lain-lain yang sah

2.1.1.2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal memiliki definisi (Saragih, 2003:84) suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Pengertian lain dari Sidik yang dikutip oleh Badrudin (2012:39) mengartikan desentralisasi fiskal sebagai alat dalam mencapai tujuan dalam bernegara, terutama dalam memberikan layanan publik yang lebih baik, menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis dengan melimpahkan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan adanya bantuan dalam bentuk transfer oleh pemerintah pusat.

Menurut Sidik (Badrudin, 2012:39) desentralisasi fiskal memiliki beberapa tujuan adalah :

1. Membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah.

2. Memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan mobilisasi pendapatan daerah dan nasional
3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan mengembangkan aspirasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
4. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan efisiensi-efisiensi pemerintah
5. Memperbaiki kesejahteraan nasional rakyat Indonesia.

2.1.1.3. Teori Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memiliki prinsip *money should follow function*, yang artinya setiap wewenang pemerintah yang diserahkan atau dilimpahkan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu turunan dari kebijakan otonomi daerah sebagai pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari pusat ke daerah. Ketika semakin banyak wewenang yang dilimpahkan maka akan berimplikasi kepada semakin besar pula biaya yang harus dibutuhkan oleh daerah.

Oleh karena itu, hal yang menjadi dianggap penting ketika pelaksanaan desentralisasi fiskal oleh suatu negara adalah perlu dilaksanakan prinsip efisiensi dimana anggaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah atau layanan publik digunakan secara efisien tetapi output yang dihasilkan harus maksimal.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal ini di sisi pengeluaran dibiayai terutama oleh transfer

daerah. Dengan begitu maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi untuk membelanjakan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

Hubungan fiskal antarpemerintah yang berlaku pada saat ini terdapat dua jenis, yaitu federalisme fiskal dan keuangan federal. Federalisme fiskal adalah model hubungan antarpemerintahan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan dari pusat. Implikasi dari pelaksanaan model hubungan ini adalah berbagai bentuk transfer yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digunakan untuk menggalakan otonomi regional dan memperbaiki infrastruktur lokal. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan model ini adalah desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Model keuangan federal merupakan model hubungan fiskal dimana batas-batas resmi, penyerahan fungsi, wewenang serta, pembiayaannya sudah secara umum ditetapkan melalui undang-undang.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya sebuah proses yang diaplikasikan melalui kebijakan dari pemerintah dan swasta untuk mengelola sumber-sumber daya yang ada dengan membentuk kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk membuka peluang lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan utama yang hampir sama dengan pembangunan ekonomi, yaitu untuk mencapai peningkatan jenis dan jumlah peluang kerja sehingga dapat tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Pemikiran ini didasarkan pada kritik atas kelemahan-kelemahan atau penyempurnaan terhadap pandangan/asumsi klasik. Salah satu model di pemikiran ekonomi klasik adalah model pertumbuhan Solow. Di dalam model ini dijelaskan bahwa proporsi faktor produksi diasumsikan dapat berubah (jumlah kapital dan tenaga kerja) atau rasio dari kedua faktor ini dalam sebuah proses produksi tidak harus konstan. (Tambunan, 2011).

Model ini menganalisis pertumbuhan ekonomi (Y) dengan menggunakan fungsi produksi *Cobb-Douglas* dengan dua faktor produksi, yaitu kapital (K) dan tenaga kerja (L) dapat tumbuh pada tingkat berbeda :

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{\beta}$$

di mana :

α = Konstanta

β = elastisitas output terhadap kapital dan tenaga kerja.

Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas $\alpha + \beta = 1$ (atau $\beta - 1 = \alpha$), yang artinya bahwa peningkatan output sama persis dengan produktivitas fisik marginal dari kedua faktor produksi tersebut dikalikan dengan kenaikannya.

2.1.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrord Domar

Teori yang dikembangkan oleh Harrord Domar merupakan pengembangan dari teori analisis yang dilakukan oleh John Maynard Keynes mengenai kegiatan

ekonomi secara nasional dan masalah dalam ketenagakerjaan. Teori yang dijelaskan oleh Harrod Domar melengkapi teori yang dikembangkan oleh Keynes sebelumnya, ia melengkapi teori sebelumnya dengan menambahkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat bertumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

Pemahaman mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi antara pemikiran klasik dan Keynes dibandingkan pemikiran Harrod Domar memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut adalah pada pemikiran kaum klasik dan Keynes hanya memperhatikan pada pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi sedangkan pemikiran Harrod Domar menjelaskan beberapa aspek, seperti peranan pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Harrod Domar menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap perekonomian harus memiliki cadangan atau menabung sebagian dari pendapatan nasional yang dimilikinya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang telah susut atau rusak. Namun untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan stok modal (Todaro, 2006:128).

Teori ini memiliki beberapa asumsi, yaitu : a.) perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal di dalam masyarakat secara penuh, b.) perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dimana pemerintahan dan perdagangan luar negeri tidak ada, c.) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan

besarnya pendapatan nasional dimana fungsi tabungan dimulai dari titik nol, dan d.) kecenderungan untuk menabung atau *marginal propensity to save (MPS)*, rasio modal-output atau *capital-output ratio (COR)*, dan rasio pertambahan output-modal atau *incremental capital-output ratio (ICOR)* besarnya tetap.

2.1.3. Ketimpangan Wilayah

Literatur mengenai evolusi atau perubahan kesenjangan, terutama kesenjangan pendapatan awalnya didominasi oleh hipotesis Kuznet. Simon Kuznet menemukan adanya suatu relasi antara tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik. Hasil tersebut diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu perekonomian perdesaan ke suatu perekonomian perkotaan.

Hipotesis Kuznet tersebut juga menggambarkan bahwa pada awal proses pembangunan, ketimpangan pendapatan akan menjadi bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi, ketimpangan akan menurun, yakni pada saat sektor industri sudah mampu menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari perdesaan (sektor pertanian), pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. (Tambunan, 2012:184).

Terdapat dua jenis ketimpangan yang sering dilakukan penelitian. Jenis ketimpangan tersebut adalah ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan pendapatan masyarakat dimana indikator yang biasa digunakan adalah indeks gini

dan ketimpangan antardaerah, karena masih terjadi kecenderungan aktivitas ekonomi lebih berkembang di wilayah di Indonesia bagian barat.

Ketimpangan pembangunan antardaerah akan selalu muncul dan menjadi semakin melebar. Beberapa teori telah menjelaskan hal ini yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pertama, Gunnar Myrdal menjelaskan bahwa proses divergen yang menyebabkan ketimpangan menjadi semakin melebar. Fenomena ini terjadi karena akibat dari proses akumulatif (*cumulative causation*). Myrdal menjelaskan dalam teori ini terdapat dampak kurang menguntungkan (*backwash effect*) untuk menjelaskan mengenai fenomena ketimpangan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang. Ia berpendapat bahwa *backwash effect* lebih besar daripada dampak penyebaran (*spread effect*). Dampak penyebaran merupakan dampak dari ekspansi di pusat kegiatan ekonomi ke daerah yang relatif tertinggal melalui peningkatan permintaan produk pertanian, bahan baku, dan barang konsumsi yang dihasilkan oleh industri kecil (Kuncoro, 2013:262).

2.1.3.1. Pengukuran Ketimpangan Wilayah

Pengukuran ketimpangan wilayah yang terjadi di suatu negara dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti Indeks Williamson, Indeks *Entropy Theil*, Indeks Jaime Bonet, dan konvergensi sigma (Kuncoro, 2013:269). Di dalam sub bab ini akan di bahas indeks yang sering digunakan, yaitu Indeks Wiliamson, Indeks Entropi Theil, dan Indeks Jaime Bonet.

2.1.3.1.1. Indeks Wiliamson

Indeks ini memiliki nilai yang berada pada $0 < IW < 1$, dimana jika nilainya semakin mendekati nilai nol, artinya wilayah tersebut tidak semakin timpang dan

jika nilainya mendekati nilai satu, artinya wilayah tersebut semakin timpang. Metode tersebut cara penghitungannya adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2013:270) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \times \frac{A_i}{A_{tot}}}}{\bar{y}} \text{ atau } IW = \frac{1}{\bar{y}} \left[\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \times \frac{A_i}{A_{tot}} \right]^{1/2}$$

di mana :

y_i = PDRB per kapita provinsi i (juta Rupiah)

\bar{y} = rata-rata PDRB per kapita seluruh provinsi (juta Rupiah)

A_i = jumlah penduduk di provinsi i (jiwa/orang)

A_{tot} = jumlah penduduk di seluruh provinsi nasional (jiwa/orang).

2.1.3.1.2. Indeks Entropi Theil

Konsep ini pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Pengukuran menggunakan indeks ini memiliki kelebihan dimana pengukuran ini memungkinkan peneliti untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu secara rinci dalam subunit geografis yang lebih kecil. Penghitungan indeks ini memiliki kegunaan menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan dapat mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan spasial.

Keunggulan lain yang dimiliki oleh penghitungan menggunakan indeks ini adalah pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan derajat konsentrasi distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub-daerah dalam suatu negara.

Indeks inidapat dicari melalui rumus penghitungan sebagai berikut ini (Kuncoro dan Sutarno, 2003:100) :

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_j}{Y} \right) x \log \left[\frac{\frac{y_j}{X_j}}{\frac{Y}{X}} \right]$$

di mana :

Y_j = PDRB per kapita kecamatan i (juta Rupiah)

Y = rata-rata PDRB per kapita kabupaten (juta Rupiah)

X_j = jumlah penduduk kecamatan j (jiwa/orang)

X = jumlah penduduk kabupaten (jiwa/orang).

2.1.3.1.3. Indeks Jaime Bonet

Indeks ini merupakan pengukuran yang dilakukan oleh Bonet (2006) untuk mengukur ketimpangan sebagai variabel dependen dalam penelitiannya untuk menghitung pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di negara Kolumbia. Indeks Bonet pada provinsi untuk periode t ($IB_{i,t}$) dirumuskan sebagai berikut (Kuncoro, 2013:275) :

$$IB_{i,t} = \left| \frac{PCGDPI_{i,t}}{PCGDPNAL_t} - 1 \right|$$

di mana :

$PCGDP_{i,t}$ = pendapatan provinsi per kapita (juta Rupiah)

$PCGDPNAL_t$ = pendapatan nasional per kapita (juta Rupiah).

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah

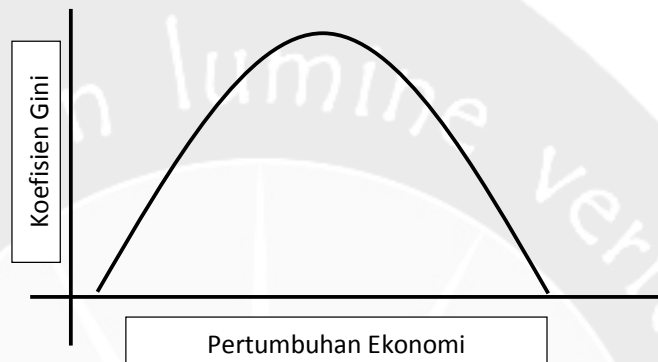
Definisi yang dijelaskan Djojohadikusumo (Badrudin, 2012:136-139) mengenai pertumbuhan ekonomi adalah sebagai meningkatnya kemampuan yang dimiliki oleh sebuah negara dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi

untuk warganya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didukung dengan semakin berkembangnya teknologi dan kelembagaan, serta terjadinya penyesuaian ideologi.

Simon Kuznet telah melakukan pengelompokan mengenai karakteristik proses pertumbuhan yang terjadi di beberapa negara maju (Badrudin, 2012:136), yaitu : Pertama, tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk yang tinggi. Kedua, tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan terutama produktivitas tenaga kerja yang semakin tinggi. Ketiga, tingkat transformasi ekonomi yang tinggi. Keempat, tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. Kelima, negara-negara maju memiliki kecenderungan untuk menjangkau seluruh dunia dalam mendapatkan pasar dan bahan baku secara ekonomis. Terakhir, hanya sepertiga populasi dunia yang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi ini.

Simon Kuznet telah melakukan beberapa penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penelitian Kuznet yang dilakukan di negara berkembang menunjukkan sebuah fenomena yang kontras antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di beberapa wilayah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Kuznet mengenai *Inverted U Curve*. Teori tersebut menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi akan ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dibarengi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Kondisi ini akan terjadi sampai pada titik krisis tertentu, di mana akan tercapai tingkat pertumbuhan ekonomi

yang tinggi disertai dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang akan semakin kecil. (Badrudin, 2012:137).



Gambar 2.1 : Kurva U Terbalik Hipotesis Kuznet

Sumber : Kuncoro, 2006 : 153.

Teori yang dikembangkan oleh Simon Kuznet jika dibandingkan dengan gambar di atas dijelaskan oleh beberapa faktor penyebab terjadinya hal tersebut berdasarkan pemikiran Simon Kuznet, dimana penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi, perubahan kesenjangan pendapatan, lingkaran pertumbuhan ekonomi yang dilewati ekonomi, dan memahami dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan.

Ketika pendapatan nasional mengalami peningkatan belum tentu hal tersebut menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan pendapatan mengalami pendistribusian yang tidak merata sehingga meskipun pendapatan menjadi lebih besar namun keadaan mayoritas rumah tangga masih buruk.

2.1.5. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Wilayah

Kebijakan desentralisasi fiskal memiliki tujuan pokok, yaitu untuk menghilangkan kesenjangan yang ada, baik kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah maupun kesenjangan horisontal antardaerah di Indonesia. Selain itu tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan demokratisasi di Indonesia sehingga kekuasaan tidak hanya terpusat di suatu daerah. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada publik dan dapat memberikan efek penyebaran antardaerah (Amir, 2012:16).

Menurut Amir di dalam jurnal Warta Fiskal yang dirilis oleh Kementerian Keuangan menyatakan bahwa desentralisasi fiskal telah terlaksana selama hampir 12 tahun namun yang terjadi adalah secara agregat ukuran ketimpangan secara nasional menunjukkan indikasi yang semakin melebar. Beliau mengatakan bahwa konvergensi dalam perekonomian nasional akan terjadi jika daerah dengan PDB per kapita kecil mampu tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan rata-rata nasional. Selain itu di dalam jurnalnya, beliau juga mengatakan bahwa penelitian lainnya (Wibowo, 2011) menyatakan bahwa selama periode desentralisasi fiskal telah terjadi ketimpangan yang semakin melebar.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Nurana dan Muta'ali (2010) adalah untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah tahun 1995-2009, mengidentifikasi pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

ketimpangan di Kawasan Ciayumajakuning. Analisis data menggunakan metode indeks *Entropy Theil*, Uji *Wilcoxon* dan uji regresi data panel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah selama 1995-2009 dengan nilai total *Theil* kawasan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap pemerataan/penurunan ketimpangan perkembangan wilayah dengan hasil uji *Wilcoxon* sebesar 0,500 pada masing-masing daerah dan 0,028 untuk total *Theil* Ciayumajakuning, namun keduanya tidak mengindikasikan pemerataan. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel rasio belanja pembangunan memiliki pengaruh signifikan dan negatif dengan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah dan variabel tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan perkembangan yang terjadi.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Apriesta dan Miyasto (2013) dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan *Recursive Models* dan juga menggunakan PLS (*Panel Least Square*) dengan menggunakan metode *Fixed Cross-Section*. Hasil olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap desentralisasi fiskal, dan desentralisasi fiskal juga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Bonet (2006) menggunakan pengalaman di Columbia dimana penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan bukti baru mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan regional. Penelitian ini melakukan beberapa analisis dengan menggunakan data panel. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap proses peningkatan kesenjangan pendapatan daerah selama periode analisis. Hasil selanjutnya adalah menjalankan sistem transfer yang adil untuk sektor dimana sumber daya yang akan dialokasikan secara memadai dan adopsi insentif memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dalam mengurangi kesenjangan pendapatan daerah. Hasil yang terakhir menunjukkan bahwa keterbukakaan ekonomi dan tren aglomerasi ekonomi memiliki dampak negatif pada kesenjangan pendapatan daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa analisis reformasi struktural 1990-an pada kesenjangan pendapatan daerah merupakan fokus yang harus diteliti untuk penelitian selanjutnya. Sudut pandang pembuat kebijakan daerah sangat penting untuk memahami perubahan struktural regional yang dihasilkan dari reformasi.

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Sutarno dan Kuncoro (2003) memiliki tujuan untuk mengidentifikasi indikator pertumbuhan ekonomi dan untuk memahami ketimpangan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Banyumas. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tipologi Klassen, Indeks Wiliamson, Indeks *Entropy Theil*, trend, dan Korelasi Pearson. Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan ke dalam empat klasifikasi, yaitu

pertumbuhan tinggi dan pendapatan tinggi, pendapatan tinggi tetapi pertumbuhan rendah, pertumbuhan tinggi tetapi pendapatan rendah, serta pertumbuhan rendah dan pendapatan rendah. Berdasarkan Indeks Wiliamson dan Indeks *Entropy Theil*, mereka menemukan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan pada periode pengamatan tahun 1993-2000. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Hasil yang paling penting adalah hipotesis Kuznet mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas. Selain itu, terdapat korelasi negatif antara Indeks Wiliamson atau Indeks *Entropy Theil* terhadap pertumbuhan GDP.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Sianturi (2009) dengan tujuan menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah 19 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2004 – 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi signifikan dan positif dipengaruhi oleh derajat desentralisasi fiskal, tenaga kerja dan tingkat aglomerasi daerah tersebut. Lalu ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal secara signifikan dan positif.